

# Pemerintah Kota Bandung Dapat Tambahan 5 Ritasi ke TPA Sarimukti, Target Kembali ke 140 Rit dalam Sebulan

Category: Daerah  
10 Februari 2025



## Pemerintah Kota Bandung Dapat Tambahan 5 Ritasi ke TPA Sarimukti, Target Kembali ke 140 Rit dalam Sebulan

**Prolite** – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendapatkan tambahan kuota pembuangan sampah sebanyak 5 ritasi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan tambahan ini, ritasi harian Kota Bandung naik dari 140

menjadi 145 rit per hari selama satu bulan. Keputusan ini diambil setelah adanya Rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Pendopo Kota Bandung, Sabtu 8 Februari 2025.

Hal tersebut juga dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung dan Cimahi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menjelaskan, sejak September 2024, Kota Bandung bersama Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat telah menyepakati pengurangan ritasi ke TPA Sarimukti untuk menjaga kapasitasnya.



dok Pemkot Bandung

Saat itu, Kota Bandung dikurangi dari 170 rit menjadi 140 rit per hari, sementara daerah lain juga mengalami pengurangan serupa.

Namun, menjelang akhir Januari 2025, muncul kebutuhan tambahan ritasi karena masih ada sampah yang belum terangkut. Oleh karena itu, setelah koordinasi dengan Pj Gubernur Jawa Barat, disepakati adanya tambahan 5 rit untuk Kota Bandung.

“Kami memberikan tambahan 5 rit selama satu bulan, tetapi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah Kota Bandung harus memastikan pengelolaan sampah di rumah tangga dan TPS berjalan optimal, sehingga pada 9 Maret 2025 bisa kembali ke 140 rit per hari,” ujar Herman.

Atas hal itu, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara menuturkan, tambahan ini harus dimanfaatkan dengan optimal oleh semua pihak.

“Sisanya harus dan wajib dikelola sendiri di sumber. Kami akan memperkuat pengolahan mandiri di 10 klaster, mulai dari rumah

tangga hingga sektor komersial. Targetnya, sampah yang masuk ke TPA hanya residu yang tidak bisa didaur ulang,” katanya.

Konsep Zero Waste menjadi solusi utama dalam pengurangan sampah ke TPA Sarimukti. Meskipun tidak berarti nol sampah, program ini menargetkan maksimal hanya 20–30% sampah yang berakhir di TPA.

Namun, Koswara menegaskan, penerapan Zero Waste membutuhkan waktu dan perubahan budaya masyarakat.

Selain itu, optimalisasi berbagai sumber pengolahan sampah terus dikebut Pemkot Bandung, seperti optimalisasi TPST, pemanfaatan mesin Motah, bank sampah, rumah maggot dan penambahan RW KBS.

Pemkot Bandung juga bersama seluruh stakeholder, termasuk camat, lurah, dan masyarakat, terus didorong untuk mengoptimalkan pengolahan sampah.

Dengan kerja keras bersama, Koswara berharap jumlah ritasi bisa kembali ke 140 rit per hari sesuai target pada Maret mendatang.

---

**Hari Pers Nasional, Pj Wali Kota Bandung: Media Adalah Pelita Bagi Masyarakat Menuju**

# Indonesia Emas

Category: Daerah  
10 Februari 2025



## Hari Pers Nasional, Pj Wali Kota Bandung: Media Adalah Pelita Bagi Masyarakat Menuju Indonesia Emas

**Prolite** – Memperingati Hari Pers Nasional tahun 2025, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan pentingnya peran pers dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa tantangan besar bagi dunia pers. Disrupsi informasi yang terjadi menyebabkan masyarakat dihujani oleh jutaan informasi setiap detiknya, termasuk berita bohong atau hoaks yang dapat menyesatkan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang tetap

berpegang pada prinsip jurnalistik yang akurat, jujur, berimbang, dan bertanggung jawab.

“Pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi yang akurat, jujur, berimbang, dan bertanggung jawab,” ujar Koswara dalam pernyataan resmi di Instagram @halobandung.



dok Pemkot Bandung

Ia berharap, pers tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta terus berperan aktif dalam mendidik, menghibur, mencerdaskan, mengontrol, mengoreksi, bahkan memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah dan berbagai pihak.

Dengan demikian, menurutnya, pers dapat menjadi cahaya penerang bagi masyarakat menuju cita-cita Indonesia Emas.

“Dengan demikian, pers dapat menjadi pelita bagi masyarakat menuju Indonesia Emas,” tambahnya.

Koswara juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jurnalis yang selama ini telah berjuang di garis terdepan dalam menjaga kebebasan pers yang berintegritas.

Menurutnya, kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang cerdas dan demokratis.

“Terima kasih kepada para jurnalis yang telah berjuang di garda terdepan dalam mewujudkan kebebasan pers yang berintegritas,” ujarnya.

Momentum Hari Pers Nasional 2025 ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh elemen media untuk terus berkontribusi dalam memberikan informasi yang berkualitas, membangun optimisme, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Selamat Hari Pers Nasional 2025!

---

# Kecamatan Bandung Wetan Gelorakan Jumat Bersih, Menuju Lingkungan Bersih dan Asri

Category: Daerah  
10 Februari 2025



## Kecamatan Bandung Wetan Gelorakan Jumat Bersih, Menuju Lingkungan Bersih dan Asri

**Prolite** – Kecamatan Bandung Wetan kembali mengadakan kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) di daerah Kelurahan Cihapit tepatnya di 3 titik lokasi yaitu di Taman Cilaki, Jalan Cisangkuy, dan daerah di sekitar Taman Cibeunying, Jumat 7 Februari 2025.

Kegiatan ini juga melibatkan berbagai macam personil yang berada di bawah kecamatan seperti ASN (Aparatur Sipil Negara), non ASN, dan juga Forkopimcan (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan).

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang berada di kecamatan ini seperti Karang Taruna dan Forum RW juga turut berpartisipasi. Mereka ikut membersihkan lingkungan bersama Goper (Gorong-gorong dan kebersihan) serta Linmas (Perlindungan Masyarakat).



dok Pemkot Bandung

Gerakan Jumsih dimulai pada pukul – WIB. Dimulai dengan apel pagi untuk koordinasi pembagian tempat dan juga sarapan, para petugas yang terlibat pun disebar untuk membersihkan daerah tersebut.

Dengan banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Jumsih ini masyarakat pun diharapkan dapat mengikuti gerakan ini agar lingkungan sekitar tetap terjaga.

“Harapan untuk ke depannya bisa dilaksanakan di semua RW dan bahkan bisa melibatkan semua elemen masyarakat untuk pelaksanaan Jumat Bersih, karena berkaitan juga dengan penanganan sampah di Kota Bandung,” ujar Camat Bandung Wetan, Rizka Ariyani di Taman Cibeunying, Jumat, 7 Februari 2024.

Rizka juga menambahkan, dengan kegiatan ini, masyarakat dapat teredukasi tentang pengolahan dan pemilahan sampah serta menjadi contoh untuk masyarakat.

---

# Kota Bandung dan Hamamatsu Jajaki Kerja Sama di Bidang SDM dan Kesehatan

Category: Daerah  
10 Februari 2025



## Kota Bandung dan Hamamatsu Jajaki Kerja Sama di Bidang SDM dan Kesehatan

**Prolite** – Pemerintah Kota Bandung menerima kunjungan delegasi dari Kota Hamamatsu, Jepang, di Ruang Tata Praja Balai Kota Bandung, Kamis 6 Februari 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas kerja sama di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta sektor kesehatan dan medis.

Anggota Dewan Kota Hamamatsu, Suzuki Hiroyuki menegaskan

komitmen Kota Hamamatsu dalam meningkatkan hubungan dengan Bandung, khususnya dalam bidang kesehatan dan pengembangan SDM.



dok Pemkot Bandung

“Saya juga berfokus pada bidang kesehatan, termasuk membantu talenta muda Indonesia untuk berkarier di Jepang. Selain itu, saya memiliki peran di Kementerian Ekonomi Jepang untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia,” ujar Suzuki.

Menurutnya, banyak industri di Jepang yang membutuhkan tenaga kerja muda dari Indonesia, khususnya di sektor kesehatan.

Oleh karena itu, kerja sama ini tidak hanya membuka peluang karier bagi tenaga muda Indonesia tetapi juga mendorong program pertukaran pelajar dan tenaga profesional antara kedua kota.



dok Pemkot Bandung

“Dengan berbagai hal yang bisa kita kerjasamakan ke depan kami punya harapan kerjasama akan semakin meningkat. Harapan kami ini jadi manfaat bagi kedua kota,” katanya.

Atas hal itu, Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain berharap, kerja sama ini dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta tata kelola manajemen rumah sakit di Kota Bandung.

“Kami berharap peninjauan kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan pengelolaan fasilitas medis di Kota Bandung,” ujar Iskandar.

“Bukan hanya tenaga kesehatan saja, tapi juga sektor industri dan juga kerjasama di bidang pendidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berproses kerjasamanya,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Direktur RSUD Bandung Kiwari, Yorisa Sativa mengatakan, Jepang merupakan salah satu negara yang punya pendidikan dan teknologi kesehatan yang baik. Untuk itu, berbagai kerja sama dapat dijalin di antaranya penanganan limbah media B3, biohazard dan penanganan gempa.

“Kami perlu masukan dalam mitigasi gempa di rumah sakit gempa, kami juga ditunjuk Kemenkes sebagai rumah sakit dalam penanganan gempa kaitannya dengan sesar Lembang. Hal ini bisa kita kerjasamakan dalam penanganan gempa tersebut yang diprediksi bisa terjadi kapan saja,” katanya.

Selain itu, ada pula kerja sama pelatihan untuk perawatan lansia, penanganan kekerasan ibu dan anak serta disabilitas.

Sebelumnya, Kota Bandung dan Hamamatsu telah menjalin hubungan sister city sejak ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) pada 19 Desember 2014, yang kemudian diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU). Sejak saat itu, berbagai program telah dilaksanakan, termasuk:

1. Program Hibah Pencegahan Kebocoran Air (2017–2019), kerja sama antara Perumda Tirtawening dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
2. Dukungan Teknis untuk Pemeliharaan dan Manajemen Pipa Air, sebagai bagian dari pelatihan personel dalam sistem penyediaan air.

MoU antara kedua kota berakhir pada 26 Juli 2024, namun Bandung dan Hamamatsu telah sepakat untuk memperpanjang kerja sama dengan cakupan yang lebih luas.

Selain bidang akademik, lingkungan, dan penyediaan air, kerja sama kini mencakup pengembangan SDM, ketenagakerjaan, pendidikan, serta sektor kesehatan dan medis.

---

# Penanganan Banjir Bandung Butuh Kolaborasi Multisektor

Category: Daerah  
10 Februari 2025



## Penanganan Banjir Bandung Butuh Kolaborasi Multisektor

**Prolite** – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara menilai, penanganan banjir di Kota Bandung tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah menerapkan konsep tersebut, tetapi tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dan keberlanjutan program.

“Saya kira apa yang dilakukan oleh Pemkot Bandung sudah mengakomodir konsep itu, tinggal konsistensinya. Apakah

keberlanjutan dari program-program ini bisa dilakukan atau tidak?” ujar Koswara, di sela-sela peresmian Kolam Retensi Pasar Gedebage, Rabu 5 Februari 2025.



dok Pemkot Bandung

Berbagai langkah yang telah diambil oleh Pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) telah menunjukkan hasil positif. Genangan banjir di sejumlah titik yang awalnya berjumlah 68 lokasi kini telah berkurang menjadi 6 lokasi.

Koswara mengatakan, koordinasi dengan daerah sekitar, terutama Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat terkait dengan penanganan di hulu yakni di wilayah Bandung Utara merupakan hal yang penting.

“Kalau di hulu makin kritis, upaya di hilir akan sia-sia. Makanya kita harus menguatkan kolaborasi dengan kabupaten/kota sekitar, serta memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan, khususnya di Bandung Utara,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Rusmawan, mengapresiasi kerja keras Pemkot Bandung dan DSDABM dalam menangani banjir.

“Siang malam mereka terus memikirkan solusi. Saya juga melihat sendiri progresnya selalu ada, meskipun belum sepenuhnya selesai,” ungkap Andri.

Ia menegaskan, penyelesaian banjir di Bandung, khususnya di Gedebage, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung, tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Ketika ada rencana membuat sodetan untuk mengalirkan air ke Gedebage, malah terjadi perdebatan dengan Kabupaten Bandung. Ke depan, ego sektoral ini harus dihilangkan. Permasalahan banjir adalah masalah kita bersama,” tuturnya.

Selain pembangunan kolam retensi dan infrastruktur pengendali banjir, Andri menekankan perlunya kebijakan tata kelola air yang terencana dengan baik.

“Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih nanti harus memiliki ‘blueprint’ kebijakan yang jelas tentang aliran air dari hulu ke hilir,” ujarnya.

---

## Kolam Retensi Pasar Gedebage Diresmikan, Bantu Kurangi Potensi Banjir

Category: Daerah  
10 Februari 2025



## **Kolam Retensi Pasar Gedebage Diresmikan, Bantu Kurangi Potensi Banjir**

**Prolite** – Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara meresmikan Kolam Retensi Pasar Gedebage sebagai langkah strategis dalam mengurangi potensi banjir di kawasan Gedebage dan sekitarnya, Rabu 5 Februari 2025.

Kolam Retensi Pasar Gedebage menjadi kolam retensi ke-14 yang dibangun Pemkot Bandung. Berada di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), kolam ini memiliki luas meter persegi dengan volume tampungan mencapai meter kubik.

Dilengkapi dengan dua pompa berkekuatan total 300 liter per detik, kolam ini berfungsi menampung sementara air hujan sebelum dipompa ke sungai.

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu, melibatkan berbagai sektor dari hulu ke hilir.



dok Pemkot Bandung

“Apa yang dilakukan Pemkot Bandung sudah mengakomodasi konsep ini. Tinggal bagaimana konsistensi dan keberlanjutannya. Masih ada meter kubik air dari Sub DAS Cinambo yang belum terkelola, tetapi kita bisa melihat dampak positifnya, seperti waktu surutnya genangan yang kini lebih cepat,” jelasnya.

Koswara mengatakan, kolaborasi dengan Kabupaten Bandung dan wilayah lain dalam upaya penanganan banjir sangat penting. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan bersama dan lintas sektor.

“Jika di hulu kondisi kritis, upaya di hilir akan sia-sia. Oleh karena itu, koordinasi antar daerah menjadi kunci utama dalam penyelesaian masalah ini,” tambahnya.

Saat ini, jumlah titik genangan di Kota Bandung yang

sebelumnya mencapai 68 kini tinggal 6 titik. Pemkot Bandung juga berencana membangun tiga kolam retensi tambahan dalam waktu dekat untuk semakin mengurangi risiko banjir.

“Kami berharap kolam retensi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Gedebage dan sekitarnya, serta menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam pengendalian banjir di Kota Bandung,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Didi Ruswandi mengungkapkan, pembangunan kolam ini merupakan bagian dari strategi besar pengendalian banjir di kawasan Gedebage.

“Gedebage adalah wilayah yang fenomenal dalam urusan banjir. Dengan tambahan kolam retensi ini, genangan air di Sub DAS Cinambo dapat berkurang, meskipun masih ada meter kubik air yang perlu dikelola lebih lanjut,” katanya.

Selain pembangunan kolam retensi di hilir, konservasi di hulu juga penting agar air hujan tidak langsung mengalir ke wilayah hilir.

“Kami sudah memasukkan rencana pembangunan area konservasi untuk menahan air hujan di lembah sebelum turun ke pemukiman. Ini merupakan langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir,” jelasnya.

---

## **Pemkot Bandung Siap Terbitkan Instruksi Wali Kota Efisiensi**

# Anggaran

Category: Daerah  
10 Februari 2025



## Pemkot Bandung Siap Terbitkan Instruksi Wali Kota Efisiensi Anggaran

**ProLite** – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara mengatakan, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera menerbitkan Instruksi Wali Kota (Inwal) sebagai pedoman efisiensi anggaran.

Hal ini sebagai langkah menindaklanjuti terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025,

“Untuk intruksi kepada OPD sudah kita buat sesuai Intruksi Presiden nanti mekanismenya sudah ada panduan juknis kemendagri,” ujar Koswara, Rabu 5 Februari 2025.

Sebagai langkah awal, Pemkot Bandung telah mengevaluasi belanja daerah sejak Desember 2024. Dalam proses review APBD 2025, Pemkot Bandung akan memastikan efisiensi di berbagai pos anggaran tanpa mengganggu layanan publik yang esensial.

“Selanjutnya akan dilakukan pembaharuan teknis mengubah anggaran dengan dewan akan dilakukan bersama,” ungkapnya.

Ia berharap, penerbitan Inwal ini akan memperkuat upaya Pemkot Bandung dalam mewujudkan anggaran yang lebih efektif dan efisien, sejalan dengan arahan Presiden serta regulasi yang ada.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Prabowo meminta agar kegiatan bersifat seremonial hingga seminar dibatasi.

Instruksi itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Arahan Prabowo membatasi kegiatan seremonial termaktub dalam poin keempat. Instruksi ini diperuntukkan bagi gubernur, bupati, hingga wali kota.

---

**Kebun Binatang Bandung  
Disegel, Pemkot Pastikan  
Karyawan tak Kehilangan**

# Pekerjaan

Category: Daerah  
10 Februari 2025



## **Kebun Binatang Bandung Disegel, Pemkot Pastikan Karyawan tak Kehilangan Pekerjaan**

**Prolite** – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) telah menyegel terhadap lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah mendapat surat penetapan sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Terkait hal ini, Pemkot Bandung memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawan yang telah bekerja di sana.

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan, yang mengalami perubahan hanya pihak pengelola, sedangkan karyawan tetap bekerja seperti biasa.



dok Pemkot Bandung

“Kalau pengelola ini kan badan usahanya atau pengelolanya yang diganti, kalau karyawan masih yang lama, tidak ada yang diganti. Masalahnya hanya pada badan pengelola, apakah tetap berbentuk badan usaha atau yayasan. Kalau mau ganti, kami serahkan kepada persatuan Kebun Binatang untuk menyeleksi pengelola yang baru,” ujar Koswara, di sela-sela peresmian Kolam Retensi Pasar Gedebage, Rabu 5 Februari 2025.

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar, Dwi Agus Afrianto mengungkapkan, penyegelan dilakukan pada pekan lalu. Penyitaan ini mencakup enam titik aset milik Yayasan Margasatwa, termasuk kantor operasional, gedung, dan gudang.



dok Pemkot Bandung

Dwi memastikan, seluruh karyawan serta satwa di Bandung Zoo tetap dalam kondisi prima dan beraktivitas seperti biasa.

“Kita pastikan baik karyawan maupun satwa tetap dalam kondisi baik. Sampai nanti ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengoperasikan kebun binatang ini,” kata Dwi di kantornya, Selasa 4 Februari 2025.

Meskipun sudah dilakukan penyegelan, Kejati Jabar tetap mengizinkan operasional Kebun Binatang Bandung agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi karyawan maupun satwa yang ada di sana.

Kejati juga mengusulkan agar ke depan Bandung Zoo dikelola oleh pihak ketiga yang lebih kompeten, mengingat beberapa pengurus yayasan saat ini tengah menghadapi dugaan tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui, Kejati Jabar telah menahan dua tersangka, Sri Devi (S) dan Raden Bisa Bratakusuma (RBB), dalam kasus

dugaan penguasaan lahan Kebun Binatang Bandung secara ilegal. Keduanya diduga tidak pernah menyetorkan keuntungan dari pengelolaan kebun binatang ke kas daerah Pemkot Bandung.

Lahan Kebun Binatang Bandung yang berlokasi di Jalan Kebun Binatang Nomor 6 dengan luas meter persegi dan di Jalan Kebun Binatang Nomor 4 seluas 285 meter persegi merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung.

---

# **Resmikan Kantor Kelurahan dan Kecamatan, Pj Wali Kota Bandung: Pelayanan Harus Lebih Prima**

Category: Daerah  
10 Februari 2025



## Resmikan Kantor Kelurahan dan Kecamatan, Pj Wali Kota Bandung: Pelayanan Harus Lebih Prima

**Prolite** – Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara meresmikan sejumlah kantor pelayanan publik di kewilayahan tahun anggaran 2024 ini terdiri dari 2 kantor kecamatan dan 8 kantor kelurahan. Harapannya, pelayanan publik bisa semakin prima.

“Skala Kota Bandung ini, keberadaan camat dan lurah sangat penting. Untuk pelayanan itu harus mempunyai infrastruktur pemerintahan yang layak. Ini bukti keseriusan kita memberikan pelayanan,” ujar Koswara pada acara persemian kantor kelurahan dan kecamatan, di Kantor Kecamatan Batununggal, Selasa 4 Februari 2025.

Ia mengungkapkan, kemudahan akses layanan menjadi penting, dengan hadirnya kantor pelayanan di kewilayahan yang representatif diupayakan lebih cepat dan nyaman.

“Kemudahan akses terhadap layanan itu menjadi penting. Sehingga ke depannya untuk bangunan pemerintahan itu disiapkan

oleh satu instansi, sehingga konsultan yang sama, contohnya desain mencerminkan Kota Bandung,” beber Koswara.

Di tempat yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Asep Saeful Gufron menyampaikan, pada anggaran tahun 2024 sebanyak 12 kantor kelurahan dan kecamatan.

“Dari 151 kelurahan masih ada PR sekitar 30 kantor kelurahan yang harus di renovasi. Ini untuk lebih representatif sebagai kantor pelayanan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Asep menambahkan, adapun maksud dan tujuan pembangunan gedung kantor kecamatan dan kelurahan yang saat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat antara lain lebih cepat, mudah, gratis nyaman dan menyenangkan bagi masyarakat.

“Kantor kecamatan dan kelurahan merupakan etalase Pemkot Bandung, maka dengan adanya kantor yang lebih baik diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi seluruh aparat dikewilayahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kewilayahan,” tandasnya.



dok Pemkot Bandung

### **Berikut kantor kecamatan dan kelurahan yang diresmikan:**

Kantor Kecamatan:

1. Gedung Kantor Kecamatan Batununggal  
(luas bangunan ,9 meter persegi, luas tanah meter persegi, 3 lantai)
2. Gedung Kantor Kecamatan Sukajadi  
(luas bangunan 877,2 meter persegi, luas tanah meter persegi, 3 lantai)

Kantor Kelurahan:

1. Gedung Kantor Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung

(luas bangunan 453 meter persegi, luas tanah 977 meter persegi, 2 lantai)

2. Gedung Kantor Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon  
(luas bangunan 350 meter persegi, luas tanah 500 meter persegi, 2 lantai)
3. Gedung Kantor Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracacondong  
(luas bangunan 401 meter persegi, luas tanah 225 meter persegi, 3 lantai)
4. Gedung Kantor Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan  
(Luas bangunan 508 meter persegi, luas tanah 735 meter persegi, 2 lantai)
5. Gedung Kantor Kelurahan Cibaduyut, kecamatan Bojongloa Kidul  
(Luas bangunan 362 meter persegi, luas tanah 610 meter persegi, 2 lantai)
6. Gedung Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir  
(Luas bangunan 524 meter persegi, luas tanah meter persegi, 2 lantai)
7. Gedung Kantor Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap  
(Luas bangunan 414, 2 meter persegi, luas tanah 907 meter persegi, 2 lantai)
8. Gedung Kantor Kelurahan Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler  
(Luas bangunan 379 meter persegi, luas tanah 433 meter persegi, 2 lantai).

---

**Stok LPG 3 Kg Aman, Tidak Ada**

# Kelangkaan di Kota Bandung

Category: Daerah  
10 Februari 2025



## Disdagin Kota Bandung Pastikan Stok LPG 3 Kg Aman

**BANDUNG, Prolite** – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memastikan pesediaan LPG 3 Kg di Kota Bandung aman. Bahkan Pertamina akan memberikan pasokan tambahan untuk Kota Bandung.

“Kami terima informasi dari Pertamina bahwa stok LPG 3 Kg ini aman untuk Kota Bandung dan malah akan menambah extra dropping atau fakultatif,” kata Kepala Disdagin Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin di kantor Disdagin Kota Bandung, Selasa, 4 Februari 2025.

Ronny menerangkan, stok di Kota Bandung sebenarnya mencukupi.

Kesulitan warga untuk memperoleh LPG 3 kg karena ada aturan baru per 1 Februari tentang larangan pengecer menjual ke konsumen. Akibatnya, warga yang biasa membeli ke warung menjadi membeli ke pangkalan.

Hasil pemantauan, pembelian oleh warga Kota Bandung sebenarnya terlayani. Antrean di pangkalan terjadi karena warga biasanya membeli di warung atau pengecer.

Saat ini, warga yang telah terdata oleh pemerintah pusat bisa membeli hanya dengan menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan yang belum terdata, bisa membawa KTP dan KK. Selanjutnya akan langsung didata menggunakan aplikasi.

Kendati stok aman, Ronny memastikan, Disdagin Kota Bandung akan terus memantau kondisi di lapangan.

“Kita selalu berusaha agar warga bisa memperoleh kebutuhannya dengan lancar. Jika ada kekurangan stok, tentu kita akan berkoordinasi dengan Pertamina,” tuturnya.

Di luar itu, Ronny mengimbau agar warga tak panik. Warga tak perlu membeli LPG 3 kg secara berlebihan.